



KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DATA KEPEGAWAIAN
TAHUN 2017



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2017

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DATA KEPEGAWAIAN
TAHUN 2017

A. LATAR BELAKANG

• **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

• **Gambaran Umum**

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, sehingga pengaruhnya pada kinerja dan tingkat kehidupan manusia seiring dengan perkembangan global. Era Teknologi Informasi (TI) dimana semua hal ikhwil dapat dijelajah, ditelusuri bahkan tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Penggunaan Teknologi Informasi dapat menunjang kegiatan kerja atau mempermudah penyelesaian tugas-tugas dibidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu efisiensi dan efektivitas didalam pelaksanaan tugas kedinasan juga akan meningkat. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif.

Setiap pengelola manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerja keras meningkatkan mutu dan keakuratan dalam menyajikan data kepegawaian di era yang semakin kompetitif ini. Database yang semakin variatif diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang luas bagi pimpinan, sehingga data yang disajikan sangatlah penting untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang strategis secara cepat dan tepat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 salah satu fungsinya yaitu melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan didalamnya mempunyai kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan data kepegawaian untuk disajikan dalam bentuk aneka informasi Statistik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Simpeg di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 48 bahwa mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif, oleh karena amanat tersebut dipandang perlu untuk selalu mengembangkan sistem informasi kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan tentang informasi kepegawaian.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 59 (lima puluh sembilan) satuan unit kerja sesuai SOTK baru yang berpedoman pada PP 41/2007 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.

2. Tujuan

- a. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
- c. Secara bertahap dan berjangka panjang menyiapkan data dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian SKPD dan BKD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian PNS yang akurat dan *up-to-date*;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian ini akan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan pengelola kepegawaian masing-masing SKPD dan pengembangan aplikasi serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke SKPD maupun penyelenggaraan rapat koordinasi pengelolaan kepegawaian dengan mengundang pengelola kepegawaian seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan harapan tercapainya sebuah mekanisme *updating* data pada Aplikasi SIMPEG yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengelolaan kepegawaian khususnya bagi pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2017											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK	■	■				■		■				
2	Penggandaan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Rapat Teknis Penghubung		■					■		■	■		
4	Koordinasi/Konsultasi		■	■	■	■		■	■	■	■	■	
5	Belanja Pengembangan Aplikasi				■					■	■	■	

G. KELUARAN

Keluaran dari Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah

1. Terselenggaranya komunikasi yang terus-menerus antara pengelola kepegawaian SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan BKD Provinsi Jawa Tengah.
2. Bertambahnya pengetahuan pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai Informasi Kepegawaian.
3. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian yang akurat dan *up-to-date*.
4. Dihasilkannya informasi Kepegawaian setiap saat.
5. Dihasilkannya informasi Kepegawaian secara berkala.
6. Dihasilkannya informasi Kepegawaian setiap akhir tahun.

7. Untuk meningkatkan layanan administratif dan pembinaan sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Memberikan layanan informasi kepada *stakeholder* secara cepat, tepat dan *up-to-date*
9. Dengan dilakukannya pengembangan aplikasi, semakin banyak informasi yang dapat dihasilkan.

H. ANGGARAN

Perkiraan kebutuhan anggaran sebagaimana terlampir.

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Semarang, 29 Pebruari 2016

**KEPALA BIDANG DOKLAHTA
BKD PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. S. PUDJI TJAHYONO, M.Pd.

Pembina Tingkat I
NIP. 19601020 198603 1 015